

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa simpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio kemandirian keuangan masing-masing Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung selama tahun penelitian 2008-2013 bila dibandingkan dengan tabel kriteria kemandirian jatuh pada kriteria sangat kurang karena terletak pada 0-10%, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.
2. Hasil perhitungan efektifitas daerah dengan rata-rata hasil perhitungan rasio efektifitas di Kabupaten dan Kota yang berada Provinsi Lampung mempunyai kriteria sangat efektif.
3. Hasil perhitungan Rasio aktivitas Keuangan Daerah se-Provinsi Lampung menunjukkan bahwa rata-rata rasio aktivitas Keuangan Daerah se-Provinsi Lampung tergolong mempunyai nilai yang tinggi yaitu sebesar 99,98%.
4. Berdasarkan peringkat kinerja keuangan menunjukkan bahwa terlihat bahwa kabupaten Pesawaran berada di peringkat pertama dalam hal kinerja keuangan daerah, diikuti dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan ibukota provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung

berada di peringkat 5, yang menjadi juru kunci dalam hal kinerja keuangan daerah yaitu kabupaten Tulang Bawang.

5.2 Saran

1. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan hendaknya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan dijadikan rekomendasi atas pelaksanaan Laporan Keuangan pada 12 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung, sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.
2. Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha pemungutan pendapatan asli daerah secara lebih intensif dan aktif. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu menetapkan target penerimaan secara lebih baik dengan tidak hanya perkiraan semata, melakukan penyesuaian dengan peraturan yang terkait dengan usaha peningkatan PAD dan mencari sumber-sumber PAD yang baru tanpa harus menunggu ketetapan dari pemerintah pusat.
3. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah adalah perlu dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain berupa peningkatan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan adanya pembinaan yang lebih intensif dari Departemen Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan keuangan daerah di daerah-daerah, apalagi seringnya terjadi perubahan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang otomatis juga merubah sistem pengelolaan keuangan daerah.